

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Hukum:

- Indonesia. 1994. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Buku:

- Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi, Ensiklopedi Anak, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), hlm. 523.
- Adjie, H. (2011). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Refika Aditama: Bandung.
- Ahmadi Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 2.
- Amir Syarifuddin. 2011. Hukum perkawinan islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan. Cet.I. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. v.

- Habib Adjie, (2011), Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Refika Aditama, Bandung, h.78.
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1988), hlm.
- Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.8.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Jakarta, 2006, h. 280-282.
- J.G. Brouwer dan Schilder, A Suvey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998),h. 16-17.
- Marilang, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hal. 181.
- Miru, A. dan Sakka Pati. (2012). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Rajawali Pers: Jakarta.
- Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Syarifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta:Sinar Grafika,2014) , hlm: 6.
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997, h. 154.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta,2013, hlm. 185.
- Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.
- Sonny DewiJudiasih, 2015, Hsrta Benda Perkawinan, bandung, Refika Aditama, hlm 23.

Subekti. Hukum perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke VI (PT. Intermasa, 1979), hal. 17.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 56.

Tommy Hendra Purwaka,. 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Atmajaya, Hlm. 9.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

Jurnal:

Agus, D. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Nurani Hukum*, 1(1), 71-82.

Ariani, A. I. (2019). Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257-270.

Febriana, M., & Wibawa, KCS (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Hak Asuh Anak yang Dibuat oleh Notaris. *Melek Sintaks; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8), 5946-5954.

Poernomo, S. L. (2019). Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 109-120.

Prasada, E. A., & Sapuan, A. (2017). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung. *Jurnal Hukum Uniski*, 6(1), 34-46.

Sari, WP (2023). Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum UNJA* , 1(1), 181-195.

Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16(2), 850-860.

Internet:

- digilib.uin-suka.ac.id. (n.d.). 17203010048_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Retrieved July 5, 2023, from 1.
- Gramedia. (n.d.). Ayat Tentang Pernikahan. Retrieved July 5, 2023, from 2.
- Gramedia. (n.d.). Pengertian Hak Menurut Para Ahli. Retrieved July 5, 2023, from 3.
- idr.uin-antasari.ac.id. (n.d.). BAB II.pdf. Retrieved July 5, 2023, from 4.
- muhammadiyah.or.id. (n.d.). Hak Anak Dalam Pandangan Islam. Retrieved July 5, 2023, from 5.
- nu.or.id. (n.d.). Syaikh Ibnu Qasim al-Ghazi. Retrieved July 5, 2021, from 6.
- ramadan.tempo.co. (n.d.). Berikut 7 Syarat Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam. Retrieved July 5, 2023, from 7.
- sonny-tobelo.blogspot.com. (n.d.). Teori Kewenangan. Retrieved July 5, 2023, from 8.
- tafsirweb.com. (n.d.). Surat An-Nisa Ayat 3. Retrieved July 5, 2023, from 9.
- tafsirweb.com. (n.d.). Surat An-Nisa Ayat 11. Retrieved July 5, 2023, from 10.
- tafsirweb.com. (n.d.). Surat Al-Isra Ayat 31. Retrieved July 5, 2023, from 11.
- tafsirweb.com. (n.d.). Surat Ar-Rum Ayat 21. Retrieved July 5, 2023, from 12.
- tafsirweb.com. (n.d.). Surat Al-Ahzab Ayat 5. Retrieved July 5, 2023, from 13.
- tafsirweb.com. (n.d.). Surat Al-Ahqaf Ayat 15. Retrieved July 5, 2023, from 14.
- tafsirweb.com. (n.d.). Surat At-Tahrim Ayat 6. Retrieved July 5, 2023, from 15.
- www.hukumonline.com. (n.d.). Perbedaan Perikatan dan Perjanjian. Retrieved July 5, 2023, from 16.